

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kepemimpinan adalah interaksi di mana seseorang yang memiliki peran sebagai pemimpin memengaruhi individu lain untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Konsep ini menyoroti dinamika hubungan antara pemimpin dan anggota timnya. Dalam konteks struktural, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang spesifik, tetapi juga terikat pada visi dan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemimpin yang memiliki otoritas lebih tinggi. (Amirullah, 2004)

Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan dalam mengelola sebuah organisasi, baik itu di sektor publik maupun swasta. Selain itu pemimpin juga diharapkan memiliki keunggulan dalam pengetahuan, dedikasi, dan pengalaman yang luas dibandingkan dengan anggota timnya. Untuk mencapai standar tersebut, penting bagi seorang pemimpin untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter pribadinya. Hal ini bertujuan untuk menginspirasi dan memotivasi anggota timnya agar menjalankan tugas dan aktivitas sesuai dengan program yang telah ditetapkan. (Rivai, 2012)

Desa, sebagai entitas pemerintahan terendah yang langsung berinteraksi dengan warga, memiliki kepala desa sebagai figur kunci dalam memajukan produktivitasnya. Kepala desa bertugas secara aktif dalam mengarahkan dan mengelola staf desa untuk meningkatkan efisiensi. Mereka memiliki tanggung jawab atas berbagai aspek, termasuk administrasi kantor desa, pembinaan staf, serta pemeliharaan infrastruktur desa. Seiring dengan kompleksitas tugas yang semakin bertambah, penting bagi kepala desa untuk memiliki dukungan yang efektif dan efisien dalam menjalankan tanggung jawabnya. (Ririn Sadapu, 2023)

Kinerja suatu organisasi sangat tergantung pada tingkat produktivitas individu maupun tim di dalamnya. Hasibuan menjelaskan bahwa produktivitas adalah hasil perbandingan antara output dan input, serta bagaimana sumber daya dimanfaatkan secara efisien untuk menghasilkan barang atau layanan. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas mencakup beragam aspek, termasuk sikap, mentalitas, etika, dan keterampilan, yang mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Produktivitas menjadi faktor kunci dalam kesinambungan operasional perusahaan, di mana hanya tenaga kerja yang mampu meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. (Kartono, 2016)

Tugas utama bagi para pegawai negeri adalah sebagai pengabdikan negara dan masyarakat, yang jelas diatur dalam UUD 1945 bagian keempat. Ini mencakup empat aspek utama pelayanan masyarakat, yaitu melindungi seluruh warga Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan pendidikan, dan menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Dalam pengelolaan pembangunan nasional yang kompleks, semua bagian pemerintahan, dari pusat hingga desa, berperan aktif. Penting bagi setiap komponen atau pegawai untuk memiliki kemampuan optimal dalam menjalankan tugasnya.

Desa merupakan fokus utama dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini karena pemerintahan desa merupakan fondasi terendah dari struktur pemerintahan Indonesia, yang sangat penting bagi kesuksesan upaya pembangunan nasional secara menyeluruh. Salah satu aspek yang harus diperkuat terlebih dahulu di tingkat pemerintahan terendah ini adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugas administratif, selain dari memperkuat partisipasi masyarakat dan lembaganya serta aspek-aspek lainnya.

Hasibuan menyatakan bahwa motivasi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas, karena dapat mendorong individu untuk

bekerja lebih keras dan antusias. Motivasi tersebut berasal dari beragam alasan dalam kehidupan, seperti keinginan untuk mencapai kesejahteraan melalui prestasi kerja atau jabatan tertentu dalam organisasi, yang menjadi dorongan bagi individu untuk menghasilkan output secara optimal. (Siti Maisarah Hasibuan, 2018)

Pemerintah desa dan aparatnya memiliki peran utama dalam menyelenggarakan aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta menjaga ketertiban di wilayahnya. Peran ini sangat penting karena dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran suatu unit pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan aparat desa yang memiliki kemampuan dan kerja sama yang baik dalam menjalankan tanggung jawabnya. Mereka dituntut untuk bekerja keras dan memiliki kemampuan optimal, terutama dalam menyajikan data dan informasi yang diperlukan, agar dapat melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari.

Sebagai pemimpin di suatu masyarakat, kepala desa harus memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan di lingkungan desa melibatkan upaya kepala desa untuk mempengaruhi perilaku para perangkat desa. Untuk melaksanakan fungsi kepemimpinannya, kepala desa perlu memiliki wibawa dan kemampuan untuk menggunakan wibawanya terhadap para perangkat desa agar dapat menghasilkan kinerja yang baik. Prinsip yang penting dalam sebuah lembaga adalah pembagian tugas, dengan memperhatikan kemampuan individu yang diberikan tugas. Oleh karena itu, manajemen yang efektif diperlukan untuk mengarahkan dan membina perilaku serta administrasi lembaga. Produktivitas kerja individu, tim, atau organisasi merupakan ukuran keberhasilan kinerja. Tingkat produktivitas yang tinggi menandakan keberhasilan, sementara produktivitas yang rendah menunjukkan kekurangan. Produktivitas kerja karyawan sangat penting bagi perusahaan atau unit usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. (Rivai, 2012)

Desa Cibiru Wetan, yang terletak di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, telah diakui sebagai salah satu dari 10 Percontohan Desa Anti korupsi terpilih di Indonesia oleh KPK RI pada 7 Juni 2022 di Desa Pakatto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Penetapan Desa Cibiru Wetan sebagai Desa Anti korupsi terkait dengan upaya membangun Zona Integritas yang sedang ditekankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah mendorong pencapaian penghargaan Desa Anti korupsi oleh Desa Cibiru Wetan dan mendorong pembentukan lebih banyak Desa Anti korupsi. Melalui pembentukan Desa Anti korupsi, diharapkan transparansi dalam pengelolaan dana Desa akan meningkat, yang pada akhirnya diharapkan akan mempercepat kemajuan pembangunan di Desa tersebut.

Dasar tumbuhnya semangat Desa Anti korupsi di Desa Cibiru Wetan ini adalah pengembangan sistem Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui aplikasi Simpel Desa dan Balai Desa yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengkritisi dan membuat pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa serta memerankan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara optimal.

Program Desa Anti korupsi, yang diprakarsai oleh KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, dimulai dengan pembuatan buku panduan Desa Anti korupsi. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari kementerian, LSM, pemantau desa, cendekiawan, kepala desa, tokoh agama, anggota masyarakat, pemuda, dan perempuan, serta melibatkan asosiasi pemerintahan desa. Dasar hukum untuk program ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dijelaskan dalam buku panduan Desa Anti korupsi. Kemudian, program ini dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 723/Kep.771-Inspt/2021 mengenai penyuluhan Anti korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat. Di tingkat Pemerintahan Desa Cibiru Wetan, program ini diimplementasikan melalui

Keputusan Kepala Desa Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kelompok Desa Sadar Anti Korupsi.

Tujuan dari Program Desa Anti korupsi adalah untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan pemerintahan dan komunitas desa. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Buku Panduan Desa Anti korupsi, serta untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat desa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi.

Peran kepala desa dalam program anti korupsi di desa sangat penting. Tujuan program ini adalah untuk mencegah korupsi dan meningkatkan layanan publik di desa. Kepala desa harus memimpin dengan integritas, memastikan penggunaan dana desa yang tepat, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam semua kegiatan desa. Selain itu, kepala desa harus memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program anti korupsi desa. Dengan demikian, kepala desa perlu memiliki komitmen yang kuat untuk memerangi korupsi dan memastikan kelancaran program anti korupsi di desa. (Nandang, 2022)

Fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bagaimana desa dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya, memberikan pelayanan yang baik kepada warganya, dan meningkatkan daya saing desa. Hal ini akan tercapai jika urusan yang menjadi tanggung jawab desa dapat dilaksanakan dengan efisien. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai masalah dapat menghambat proses tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Laliasa, 2018)

Peran serta perangkat desa dan kepala desa sangat krusial dalam menyediakan pelayanan masyarakat di tingkat dasar. Kualitas layanan yang diberikan tidak hanya ditentukan oleh kinerja perangkat desa sebagai bawahan, tetapi juga oleh kepemimpinan mereka. Kepemimpinan seseorang

berpengaruh besar terhadap arah dan kelangsungan organisasi yang dipimpinnya. Karakteristik kepemimpinan yang efektif tercermin dari karakter dan kepribadian pemimpin tersebut, yang menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan mereka.

Dikarenakan peran kunci kepemimpinan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi atau usaha, pemerintahan desa, sebagaimana pemerintahan pusat dan daerah, dihadapkan pada tuntutan untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Tuntutan ini mencakup baik aspek kualitas maupun kuantitas pelayanan, yang semakin meningkat dari masyarakat. Meskipun pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, penelitian ini akan memfokuskan pada peran kepala desa dalam program desa anti korupsi karena kepala desa memimpin kinerja perangkat desa.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitiannya yang berjudul: **“Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Program Desa Anti Korupsi Di Desa Cibiru Wetan Kabupaten Bandung”**

1.2 Identifikasi Penelitian

Dari latar belakang yang disebutkan diatas, temuan penelitian yang ada adalah sebagai berikut:

1. Seorang kepala desa, sebagai pemimpin dalam suatu komunitas, memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam lingkungan pemerintahan desa, kepemimpinan melibatkan upaya kepala desa untuk mengarahkan tindakan para perangkat desa dalam situasi tertentu. Selain memiliki otoritas, seorang kepala desa juga harus memiliki kemampuan untuk menggunakan otoritasnya dengan tepat terhadap para perangkat desa agar dapat memotivasi mereka untuk memberikan kinerja yang optimal.

2. Pada Tahun 2022 Desa Cibiru Wetan menjadi salah satu dari 10 Desa Percontohan Anti korupsi, menunjukkan keberhasilan dalam upaya mencegah korupsi di tingkat lokal.

1.3 Rumusan Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan, rumusan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sejauhmana kemampuan mengambil keputusan kepala desa dalam program desa anti korupsi di desa Cibiru Wetan kabupaten Bandung?
2. Bagaimana kemampuan memotivasi kepala desa dalam program desa anti korupsi di desa Cibiru Wetan kabupaten Bandung?
3. Bagaimana kemampuan komunikasi kepala desa dalam program desa anti korupsi di desa Cibiru Wetan kabupaten Bandung?
4. Bagaimana kemampuan mengendalikan bawahan kepala desa dalam program desa anti korupsi di desa Cibiru Wetan kabupaten Bandung?
5. Bagaimana kemampuan mengendalikan emosi kepala desa dalam program desa anti korupsi di desa Cibiru Wetan kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, maka peneliti bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui, antara lain:

1. Kemampuan mengambil keputusan kepala desa dalam program desa anti korupsi di desa Cibiru Wetan kabupaten Bandung
2. Kemampuan memotivasi kepala desa dalam program desa anti korupsi di desa Cibiru Wetan kabupaten Bandung
3. Kemampuan komunikasi kepala desa dalam program desa anti korupsi di desa Cibiru Wetan kabupaten Bandung
4. Kemampuan mengendalikan bawahan kepala desa dalam program desa anti korupsi di desa Cibiru Wetan kabupaten Bandung
5. Kemampuan mengendalikan emosi kepala desa dalam program desa anti korupsi di desa Cibiru Wetan kabupaten Bandung

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak yang terlibat, termasuk:

1. Manfaat Teoritis

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan pengetahuan dalam bidang pemerintahan, terutama terkait kepemimpinan kepala desa dalam program anti korupsi di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis tentang pengembangan gaya kepemimpinan, khususnya dalam implementasi program desa antikorupsi. Jika peneliti berperan sebagai pemimpin, hasil ini dapat mendukung penyediaan layanan terbaik kepada masyarakat.

b) Bagi Pembaca

Menjadi rujukan yang signifikan dan sumber wawasan bagi masyarakat umum dan staf pemerintahan desa terkait dengan inisiatif program desa anti korupsi. Harapannya, hal ini dapat menjadi model bagi pemerintah desa lain untuk mengadopsi praktik serupa.

c) Bagi Pemerintah

Menjadi model dalam menjalankan roda pemerintahan yang anti korupsi.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kepemimpinan memegang peran sentral yang krusial dalam mengelola suatu organisasi. Ini karena diakui bahwa manusia memiliki keterbatasan tertentu yang membuat adanya kebutuhan untuk memiliki sosok yang memimpin dan untuk menjadi yang dipimpin. Definisi kepemimpinan melibatkan atribut individual, strategi mempengaruhi orang

lain, interaksi sosial, posisi dalam struktur organisasi, serta persepsi mengenai otoritas yang sah. (Kartono, 2016)

Veithzal Rivai (2009) mengartikan gaya kepemimpinan sebagai pola tindakan dan strategi yang cenderung digunakan oleh seorang pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Miftah Thoha (2010), sementara itu, menggambarkan gaya kepemimpinan sebagai standar perilaku yang digunakan seseorang ketika berupaya memengaruhi perilaku orang lain atau bawahannya.

Menurut Tohardi, yang disitir oleh Edy Sutrisno (2010), terdapat dua gaya kepemimpinan, yakni:

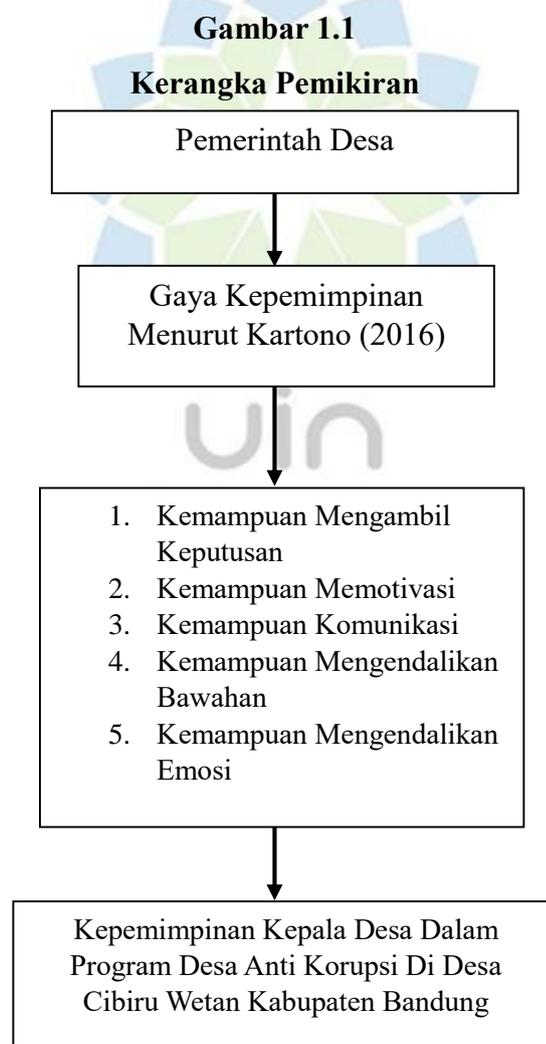
- 1) Gaya persuasif, yakni cara kepemimpinan yang menggunakan pendekatan untuk mengubah perasaan atau pikiran orang lain, atau dengan kata lain, melakukan ajakan atau bujukan.
- 2) Gaya refresif, yakni gaya kepemimpinan yang melibatkan penggunaan tekanan atau ancaman sehingga bawahan merasa takut.

Kepemimpinan melibatkan proses pengaruh terhadap orang lain untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama. Ini dimulai dengan pola gaya kepemimpinan, yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengarahkan, mempengaruhi, mendorong, dan mengendalikan individu atau kelompok untuk melakukan tugas dengan sukarela guna mencapai tujuan tertentu.

Dalam esensinya, kepemimpinan adalah tentang memengaruhi orang lain. Selain itu, juga melibatkan kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan tindakan individu atau kelompok menuju tujuan spesifik. Dalam proses pengaruh ini, seorang pemimpin menggunakan berbagai gaya yang disesuaikan dengan situasi tertentu. Gaya kepemimpinan mencerminkan pola perilaku yang dipilih pemimpin untuk membimbing dan memengaruhi anggota timnya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa

tindakan seorang atasan memiliki dampak besar pada kinerja bawahannya, yang dapat memotivasi karyawan. (Kartono, 2016)

Gaya kepemimpinan adalah aspek yang unik bagi setiap individu, menunjukkan bahwa setiap orang memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda-beda, yang dapat menjadi ciri khas mereka sendiri dan memberikan manfaat bagi semua pihak (Erlangga, 2018). Menurut (Kartono, 2016), dimensi gaya kepemimpinan meliputi beberapa aspek, termasuk: (1) Kemampuan mengambil keputusan, (2) Kemampuan memotivasi, (3) Kemampuan komunikasi, (4) Kemampuan mengendalikan bawahan, dan (5) Kemampuan mengelola emosi.



Sumber: Diolah Peneliti (2024)